

**TATA KELOLA PROGRAM SISTEM KELAS
TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB)
DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Oleh

**MAHMUDDIN
NIM 10564 00977 10**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERRSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : MAHMUDDIN
Nomor Stambuk : 10564 00977 10
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Alimuddin Said, M.Pd

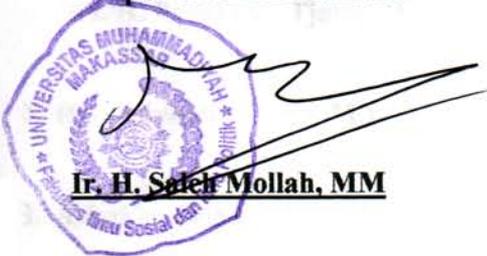


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui:

**Dekan
Fisipol Unismuh Makassar**

**Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan**



Ir. H. Saich Mollah, MM



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dekan Fisipol Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/Undangan menguji ujian Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1184/FSA/A.1- VIII/ VIII/ 38/ 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jum'at tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2017.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,

Ir. H. Saleh Mollah,MM

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. **Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si** (.....)

2. **Drs. Alimuddin Said, M.Pd** (.....)

3. **A.Luhur Prianto, SIP, M.Si** (.....)

4. **Hamdan, SIP, M.Si** (.....)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmuddin

Nim : 10564 00977 10

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

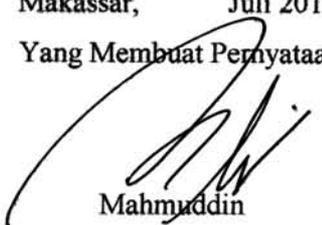
Judul Skripsi : Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)
di Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima saksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



Mahmuddin

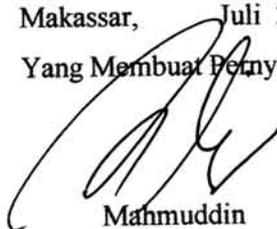
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmuddin
Nim : 10564 00977 10
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau ditulis/diduplikasikan orang lain atau melakukan plagiat, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapat sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan



Mahmuddin

ABSTRAK

MAHMUDDIN.2017. Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Nuryanti Mustari)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa, yang berlangsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa pada bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 9 orang yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa terdapat 3 bentuk tata kelola program SKTB, yakni : (1) Melalui Sosialisasi Program. (2) Penunjukan Pengelola dan Tim Pengembang SKTB. (3) Evaluasi Secara Bertahap. Dari ketiga bentuk tata kelola inilah yang sangat membantu pengembangan program SKTB di Kabupaten Gowa karena didukung oleh berbagai faktor, yakni : (1) Adanya komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SKTB. (2) Pelaksanaan SKTB di lapangan terkoordinir dengan baik. (3) Kontrol politik yang jelas dengan lahirnya PERDA SKTB. (4) Kontrol Organisasi Yang Baik Dengan Adanya Evaluasi Setiap Akhir Semester. (5) Respon yang baik dari berbagai pihak terutama sebagian besar sekolah dan masyarakat. Tata kelola program SKTB juga didukung oleh peran penting pemerintah daerah, yakni : (1) Pembuat Regulasi Pendidikan. (2) Pengawasan. Peran dan dukungan penuh Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan demi kelancaran jalannya program-program yang sedang dikembangkan di Kabupaten Gowa. Dan tiga bentuk tata kelola program SKTB inilah yang dilakukan dalam upaya tata kelola program Sistem Kelas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci : Tata Kelola, Program SKTB.

KATA PENGANTAR

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Drs. Alimuddin Said, M.Pd. sebagai pembimbing I dan ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si. sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT menggolongkan upaya – upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, SE.MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Ir. H. Saleh Mollah, M.M, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan – rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Tujuan dan Teori.....	6
B. Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	20
C. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan.....	32
D. Kerangka Pikir.....	37
E. Fokus Penelitian.....	40
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	40
III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	42

C.	Data dan Sumber Data.....	43
D.	Informan Penelitian	43
E.	Teknik Pengumpulan Data	44
F.	Teknik Analisis Data	46
G.	Pengabsahan Data.....	47
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Objek Penelitian	51
B.	Tata Kelola Program SKTB Kab. Gowa	56
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat SKTB di Kab. Gowa.....	64
D.	Peran Pemerintah dalam Tata Kelola SKTB di Kab.Gowa.....	70
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang lahir normal (fisik-mental) berpotensi menjadi cerdas. Dengan kecerdasan itu, anak akan mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Diakui bahwa orang yang cerdas banyak sekali jasanya dalam memajukan umat manusia. Dengan karya dan pandangan-pandangannya yang ilmiah akan mampu membebaskan manusia dari belenggu kebodohan dan ketertinggalan menuju tatanan hidup yang lebih baik dan beradab.

Dengan bekal pendidikan yang baik, memungkinkan seorang anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, maupun kecerdasannya. Jika seorang anak menjadi cerdas, maka sesungguhnya dia tidak membutuhkan warisan lainnya; misalnya harta benda, karena dengan kecerdasan yang dimilikinya dia bakal memperoleh kekayaan dan masa depan yang cerah. Namun untuk menjadi cerdas tidaklah mudah, diperlukan kepedulian, semangat, kerja keras, dan pengorbanan, serta pemahaman yang baik tentang pendidikan (Sekolah Unggulan, 2007: 4).

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup empat hal paling mendasar, yaitu; (1) pengetahuan yang berkenaan dengan berbagai fakta, teori, ketrampilan dan sikap, (2) afektif yang tercermin pada kualitas

keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis, (3) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (4) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan (KTB) adalah sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan berkualitas dan komprehensif kepada peserta didik yang memposisikan peserta didik sebagai subjek dalam belajar sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Kebijakan tersebut ditempuh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa sistem pendidikan, terutama pendidikan dasar yang ada tersebar dari kota hingga pelosok desa terpencil merupakan pondasi dari semua jenjang pendidikan. Pendidikan dasar seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

Umumnya setiap anak yang lahir telah dibekali (baca: memiliki) rasa ingin tahu dan rasa ingin tahu itu tidak pernah terpuaskan, karena memang

Tuhan membekali diri manusia dengan seperangkat alat yang berguna untuk memecahkan berbagai rasa keingintahuan tersebut.

Saat bayi lahir, otak anak telah memuat 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan hingga ke tingkat potensi tertinggi. Dari jumlah tersebut, ada beberapa miliar berisi informasi. Pada usia 4 tahun struktur otak bagian bawah telah berkembang menjadi 80%. Hal ini terlihat jelas pada perkembangan sensori-motorik sehingga anak terlihat menjadi aktif lasak, berlari kian kemari, bermain, naik sepeda, dan aktifitas fisik lainnya. Melalui gerakan motorik kasar yang terdapat di kaki dan motorik halus yang terdapat di tangan, gerakan otot kaki dan tangan seakan tidak pernah lelah untuk bergerak. Oleh karena itu, suatu hal yang merugikan jika pada usia ini anak disuruh duduk manis mendengarkan perintah. Menjelang usia 5 tahun anak telah memiliki hampir 90% kata yang akan digunakan kelak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemampuan tersebut hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan berkualitas.

Pendidikan berkualitas menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif belajar yang memiliki pengetahuan, keterampilan afektif, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik dalam membangun kebiasaan hidup yang sehat, mandiri, produktif, nasionalis, dan religius.

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan merupakan sistem yang dirasakan tepat untuk memberikan pelayanan pendidikan berkualitas dan komprehensif untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia utuh.

Dari latar belakang di atas , penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi ini dengan judul: Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa?
2. Aspek pendukung dalam tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa?
3. Peran pemerintah dalam tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui aspek pendukung dalam tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.
3. Untuk lebih memahami peran penting pemerintah dalam tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah, masyarakat dan peserta didik mengenai tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang mengacu pada tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tujuan dan Teori

1. Pengertian Tata Kelola

Sesuai Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (“Standar”), lingkup aktivitas audit internal di antaranya adalah Tata Kelola (governance). Pada Standar 2110 yang mengatur tentang Tata Kelola disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas di dalam organisasi.
- Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif.
- Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area yang terkait di dalam organisasi.
- Mengkoordinasikan kegiatan Dewan serta mengkomunikasikan informasi di antara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.

Selanjutnya IIA memberikan panduan lebih rinci sebagai berikut:

1. Peran audit internal sebagaimana tercantum dalam Definisi Internal Audit meliputi pula tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses tata kelola sebagai bagian dari fungsi pemastian (assurance).
2. Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum.

Standar mendefinisikan Tata Kelola sebagai: “Kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh Dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.” CAE dapat menggunakan definisi yang berbeda untuk tujuan audit apabila organisasi telah mengadopsi kerangka atau model tata kelola yang berbeda.

3. Secara global, terdapat berbagai model tata kelola yang telah diterbitkan oleh organisasi lain serta badan regulator tertentu. Sebagai contoh, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan tata kelola sebagai: “... satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan menyediakan struktur bagi penetapan tujuan perusahaan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan eserta pemantauan kinerjanya.” The Australian Securities Exchange Corporate Governance Council mendefinisikan tata kelola sebagai: “. ... sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikelola. Ini mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan”. Dalam banyak kasus, ada indikasi bahwa tata kelola adalah sebuah proses atau sistem, dan tidak bersifat statis. Apa yang membedakan pendekatan dalam Standar adalah penekanan khusus di Dewan dan kegiatan tata kelola mereka.

4. Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara organisasi satu dengan yang lain tergantung jenis organisasi dan regulasi terkait. Contohnya perusahaan publik, organisasi nirlaba, asosiasi, pemerintahan, lembaga akademik, perusahaan swasta, komisi, dan bursa efek akan dapat memiliki tata kelola yang berbeda-beda.
5. Demikian pula, desain organisasi dan praktik prinsip-prinsip tata kelola yang efektif juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas, ukuran, dan siklus kematangan hidup organisasi, struktur pemangku kepentingan, persyaratan hukum dan budaya, dan lain-lain.
6. Sebagai konsekuensi dari desain dan struktur tata kelola yang bervariasi tersebut, CAE harus bekerja dengan Dewan dan manajemen eksekutif, untuk menentukan bagaimana tata kelola harus didefinisikan untuk tujuan audit.
7. Audit internal merupakan bagian integral dari kerangka tata kelola organisasi. Posisi mereka yang unik dalam organisasi memungkinkan auditor internal untuk mengamati dan menilai secara formal struktur tata kelola, desain, serta efektivitas operasionalnya, dengan tetap independen.
8. Hubungan antara tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal harus dipertimbangkan. Masalah tersebut dibahas dalam PA 2110-2. Sedangkan PA 2110-3 membahas penilaian tata kelola.

Pengertian Tata kelola Pemerintahan adalah Menurut World Bank, Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan good governance, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Dr. Sedarmayanti, Dra., M.Pd, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT. Mandar Maju, 2003, Hal.3). Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

- 1) Orientasi Ideal, yaitu negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimasi, akuntabilitas, securing of human rights, authonomy and devolution of power, dan juga assurance of civilian control.
- 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan

sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut UNDP, Tata kelola pemerintahan (good governance) adalah sebagai suatu latihan (exercises) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya

Konsep Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan atau good governance secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah.

Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek governance, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Untuk itu, diperlukan tiga kaki yaitu :

1. Economic governance, yang meliputi proses pembuatan keputusan (decision making process) yang memfasilitasi terhadap equity (kesetaraan), poverty (kesejahteraan) dan quality of life (kualitas hidup).
2. Political governance, adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan
3. Administrative governance, adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Dari segi pemerintah (government), tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu:

1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.

2. Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Dalam tata kelola pemerintahan, domain state (negara) menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance., karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor swasta dan masyarakat. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip Tata Kelola yang Baik

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum

baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (national prosperity).

Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (responsiveness) sebagai prinsip kunci good governance.

Sementara The Canadian International Development Agency mendefinisikan bahwa good governance dicerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif, adil (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel. Sementara itu The UN Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mengemukakan 8 (delapan) prinsip good governance yakni :

1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness)
3. Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama.
4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani.
5. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
6. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum.

7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

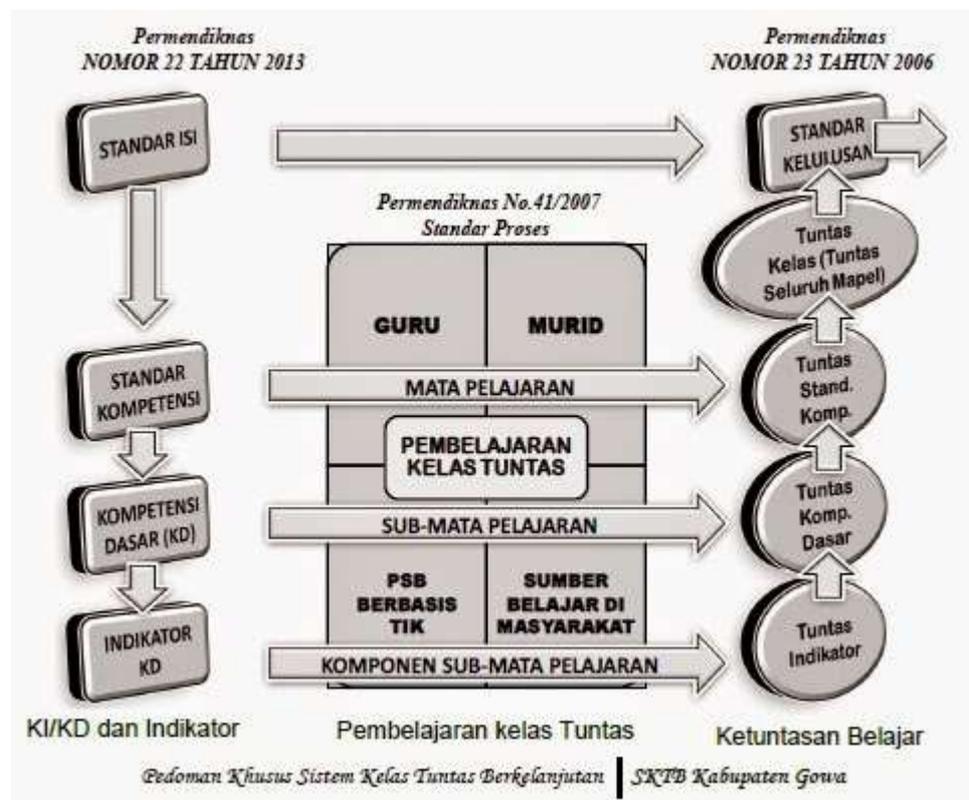
Konsep serupa juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni:

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip good governance tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, actor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip good governance dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator.

2. Pengertian SKTB

Sistem Pendidikan di Kabupaten Gowa Sulawesi selatan telah menerapkan SKTB dalam pelayanan pendidikan.



SKTB kepanjangan dari **Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan**.

SKTB sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang menekankan pada pelayanan pendidikan berkualitas dan komprehensif kepada peserta didik yang memposisikan peserta didik sebagai subjek dalam belajar sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Pengertian Kelas Tuntas Berkelanjutan SKTB adalah proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kualitas kemampuan yang dipersyaratkan kurikulum.

Secara operasional, KTB diartikan bahwa setiap peserta didik:

1.	Tuntas mencapai kualitas suatu mata pelajaran sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam Kompetensi Kelas Minimal (KKM).
2.	Tuntas menyelesaikan pelajaran satu semester berdasarkan beban SKS yang dinyatakan dalam kurikulum.
3.	Tuntas menyelesaikan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada kelas yang diikuti.
4.	Berkelanjutan mengikuti pelajaran (kompetensi) pada kelas berikutnya walaupun pada akhir pembelajaran (semester/tahun), masih ada kompetensi dasar yang belum dituntaskan (belum memenuhi KKM) pada mata pelajaran tertentu.
5.	Peserta didik tidak tinggal kelas dan tidak mengulang seluruh mata pelajaran di kelas tertentu, namun wajib menuntaskan kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu yang belum memenuhi KKB pada saat berada/duduk di kelas berikutnya.
6.	Berkelanjutan meneruskan pendidikannya (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) ke jenjang pendidikan berikutnya dengan menuntaskan semua tagihan standar kompetensi pada setiap mata pelajaran kelas terakhir.

Secara teknis, penilaian ketuntasan dilakukan berdasarkan penguasaan seluruh indikator untuk suatu Kompetensi Dasar (KD) yang dinyatakan dengan nilai ulangan yang sama atau di atas nilai KKM.

- Apabila nilai yang diperolehnya sama atau di atas nilai KKM bagi suatu Standar Kompetensi, maka peserta didik tersebut melanjutkan pembelajarannya ke Standar Kompetensi berikutnya.
- Apabila nilai yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari KKM untuk satu mata pelajaran dalam satu semester maka peserta didik melanjutkan pembelajarannya ke semester berikutnya.
- Apabila nilai yang diperoleh seorang peserta didik dalam suatu ulangan harian lebih rendah dari nilai KKM, maka peserta didik harus mendapat bantuan sehingga yang bersangkutan mencapai nilai KKM atau di atasnya. Pemberian bantuan kepada peserta didik tersebut dilakukan guru dan diistilahkan sebagai pembelajaran remedial.

Secara teknis, penilaian ketuntasan dilakukan berdasarkan penguasaan seluruh indikator untuk suatu Kompetensi Dasar (KD) yang dinyatakan dengan nilai ulangan yang sama atau di atas nilai KKM. Apabila nilai yang diperolehnya sama atau di atas nilai KKM bagi suatu Standar Kompetensi, maka peserta didik tersebut melanjutkan pembelajarannya ke Standar Kompetensi berikutnya. Apabila nilai yang diperoleh sama atau lebih tinggi dari KKM untuk satu mata pelajaran dalam satu semester maka peserta didik melanjutkan pembelajarannya ke semester berikutnya.

Apabila nilai yang diperoleh seorang peserta didik dalam suatu ulangan harian lebih rendah dari nilai KKM, maka peserta didik harus mendapat bantuan sehingga yang bersangkutan mencapai nilai KKM atau di atasnya. Pemberian bantuan kepada peserta didik tersebut dilakukan guru dan diistilahkan sebagai pembelajaran remedial. Setelah peserta didik mencapai nilai yang sama atau lebih tinggi dari KKM maka yang bersangkutan dapat melanjutkan pembelajarannya.

Nilai KKM menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Dalam Pendekatan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan nilai KKM digunakan sebagai rujukan bagi guru untuk menentukan ketuntasan belajar seorang peserta didik. Penentuan ketuntasan belajar tersebut dilakukan sejak ulangan harian pertama berkelanjutan sampai akhir tahun pelajaran.

3. Tujuan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan bertujuan :

1.	Memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta dirumuskan dalam nilai Kompetensi Kelas Minimal.
2.	Memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap kurikulum satuan pendidikan.

3.	Memberikan kesempatan kepada peserta didik yang dapat menuntaskan penguasaan semua kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran sebelum waktunya untuk diberikan kesempatan mengambil kompetensi dasar berikutnya tanpa harus menunggu tahun pelajaran berikutnya/masa kenaikan kelas .
4.	Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara utuh (kecerdasan spritual, kecerdasan emosional (intrapersonal), kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial (interpersonal), kecerdasan spasial, kecerdasan berbahasa, kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik) untuk pembentukan kepribadian bermoral, sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; dan
5.	Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

Didalam Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) yang mengacu pada Kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk aktif menggali informasi secara mandiri, baik melalui eksperimen, buku, televise, maupun internet. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu, maka ilmu pengetahuan yang diperoleh peserta didik diharapkan selalu mengikuti perkembangan.

Salah satu sumber referensi belajar peserta didik pada SKTB adalah Modul. Modul disusun sebagai bahan pembantu belajar bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

4. Manfaat Kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan memiliki beberapa keunggulan dan manfaat dibandingkan pendekatan yang berlaku di dalam sistem yang umumnya dilakukan. Manfaat tersebut antara lain:

- a. Peserta didik lebih ditantang untuk belajar mencapai standar kompetensi yang dinyatakan dalam KKM. Rasa percaya diri peserta didik menjadi lebih baik.
- b. Kualitas hasil belajar peserta didik lebih baik dan lebih tinggi serta terjamin oleh sekolah karena tidak ada peserta didik yang berkualitas di bawah KKM.
- c. Peserta didik lebih bertanggungjawab atas beban belajar yang menjadi tanggungjawabnya karena mereka harus mencapai kualitas minimal yang dinyatakan dalam KKM dan sikap bertanggungjawab menjadi sikap dirinya.
- d. Dengan pencapaian kualitas hasil belajar pada tingkat KKM dan di atasnya, pada akhir tahun tidak ada peserta didik yang tinggal kelas karena mereka memenuhi persyaratan kenaikan kelas.
- e. Dengan Sistem Kredit Semester yang menjadi bagian terintegrasi dari Kelas Tuntas Berkelanjutan, peserta didik memiliki kesempatan untuk menyelesaikan lebih cepat sehingga biaya yang dikeluarkan orangtua untuk pengeluaran pribadi dapat dihemat.

B. Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

1. Kabupaten Gowa Peraih Otonomi Awards Kategori Inspiratif

Memasuki era perdagangan bebas, iklim kompetisi tidak dapat dihindarkan dari segala aspek. Menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Gowa menjawabnya dengan menghadirkan program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Perhelatan Otonomi Awards 2014 memberikan penghargaan khusus untuk Kategori Inspiratif kepada Kabupaten Gowa melalui program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Inspiratif, karena sistem pendidikan ini lahir dan diterapkan satu-satunya di Indonesia hanya di Kabupaten Gowa. Selain itu, program ini berpotensi besar dalam menjawab permasalahan dan tantangan di dunia pendidikan dan menjadi role model bagi pemerintah daerah lain. Dalam perkembangannya, telah banyak pihak yang tertarik dengan konsep yang diinisiasi oleh Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo ini.

Melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sejak tahun 2012, program SKTB diimplementasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah di bidang pendidikan. SKTB mampu meningkatkan aksesibilitas peserta didik ke tingkatan pendidikan selanjutnya dengan memberikan kepastian dan proses ketuntasan kompetensi yang terukur di setiap jenjang tanpa mengenal sistem tinggal kelas. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Bupati Gowa bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2011 di hadapan sejumlah tokoh dan kapar pendidikan.

Sebagai langkah awal, SKTB dijalankan di beberapa sekolah percontohan. Tepatnya 50 sekolah untuk tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Gowa di tahun 2013. Baru di tahun 2014 sistem ini sungguh-sungguh dijalankan di seluruh tingkatan sekolah dasar hingga menengah atas di Kabupaten Gowa tanpa terkecuali.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan atau dikenal dengan istilah Automatic Promotion adalah sebuah pendekatan yang berupaya mengoptimalkan sistem pelayanan pendidikan dengan memaksimalkan semua komponen pembelajaran dan komponen manajemen sekolah secara efektif. Sistem SKTB mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti pendidikan dasar. Tujuan yang hendak dicapai dengan sistem SKTB adalah memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik. Hal ini memungkinkan siswa dapat belajar secara optimal dalam menuntaskan semua tagihan kompetensi pada seluruh mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. Juga membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak didik secara utuh (kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetik) sejak awal agar terbentuk kepribadian yang utuh.

Secara yuridis maupun teoritis program ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Bahkan sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun sejumlah peraturan pemerintah lainnya. Sedangkan secara teoritis, SKTB justru berdampak pada efisiensi biaya, konsep dan waktu belajar siswa.

Untuk menyusun serta membangun kerangka SKTB, maka Pemkab membentuk beberapa tim, yaitu Dewan Pakar Pendidikan melalui Keputusan Bupati No 126/I/2014, Tim Pengembang Program Kelas Tuntas Berkelanjutan melalui Keputusan Bupati No 350/IX/2012, Tim Penyusun Modul SKTB Bagi Guru SD, SMP, SMA dan SMK melalui Keputusan Kadis Pendidikan Olahraga dan Pemuda No 800/82/DIKORDA/SK/III/2014 serta Tim Penyusun Sistem Kredit Semester Pada Implementasi SKTB Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK melalui Keputusan Kadis Pendidikan Olahraga dan Pemuda No 800/041/DIKORDA/SK/I/2014.

Beberapa komponen utama dalam implementasi SKTB terus dikembangkan oleh Pemda. Pertama, ialah kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum tersebut terdiri atas kurikulum tingkat nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi berisikan Struktur, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Prinsip Pengembangan Kurikulum yang dikembangkan lebih lanjut oleh satuan pendidikan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pelaksanaan Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah implementasi dari KTSP.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan Karakter maka pada proses pengembangan silabus dan RPP dimasukkan nilai-nilai dari Pendidikan Karakter. Oleh karena itu, silabus dan RPP untuk Kelas Tuntas

Berkelanjutan adalah silabus dan RPP yang telah diperkaya dengan nilai-nilai dari pendidikan karakter.

Komponen kedua yaitu deteksi dini. Deteksi dini adalah strategi pembelajaran yang diterapkan pada awal kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui dan memetakan kompetensi siswa. Hal ini dilakukan oleh guru di awal pembelajaran setiap kali pertemuan dengan tujuan mendapatkan data dan informasi tentang minat, bakat, kompetensi dan kreatifitas setiap siswa terhadap setiap mata pelajaran.

Komponen lain misalnya Sistem Kredit Semester (SKS), penilaian, remedial/klinik dini dan pengayaan terus dievaluasi pelaksanaannya secara berkesinambungan oleh pemerintah setempat. Hal ini dilakukan agar seluruh komponen dapat terintegratif dalam proses sehingga menghasilkan output SKTB yang diharapkan bersama.

SKTB meningkatkan aksesibilitas peserta didik ke tingkatan pendidikan selanjutnya dengan memberikan kepastian dan proses ketuntasan kompetensi yang terukur di setiap jenjang. Dengan kata lain, tidak ada lagi istilah tinggal bagi siswa. Beberapa kompetensi yang belum dituntaskan, dapat dituntaskan selanjutnya tanpa harus mengulang semua kompetensi yang sudah dituntaskan.

Sistem ini menarik perhatian banyak pihak, tak terkecuali beberapa perguruan tinggi. Sampai saat ini, kurang lebih 20 universitas seperti UGM, UI, ITS, Unhas, UNM dan Universitas 45 Makassar yang menjalin kerjasama dalam bentuk MoU. Perguruan tinggi siap menerima alumni SKTB dengan biaya

penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Program SKTB juga telah diakui dan mendapat berbagai apresiasi dari sejumlah pihak.

Tidak hanya perguruan tinggi, namun beberapa pemerintah daerah lain langsung melakukan studi banding ke Gowa untuk melihat langsung penerapan SKTB. Bupati Gowa juga selalu diundang ke beberapa forum maupun instansi guna mempresentasikan konsep SKTB.

Penghentian Kurikulum 2013 oleh pemerintah pusat tidak akan mengganggu jalannya proses pendidikan di Gowa. Hal ini karena sejak tahun 2013, Kabupaten Gowa telah menjalankan konsep pendidikannya secara otonom melalui SKTB. Beberapa aspek dalam pelaksanaan SKTB terus disempurnakan demi menghasilkan alumni yang mampu menjawab tantangan global ke depan.

2. Landasan Yuridis Kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
- 2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

- 3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tentang urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan propinsi.

3. Landasan Pedagogik Kelas Tuntas Berkelanjutan

Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas berkelanjutan didasarkan pada landasan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kualitas/kompetensi yang diharapkan masyarakat/bangsa.
- 2) Kualitas yang diinginkan bangsa terumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UUSPN, pasal 3).
- 3) Kualitas belajar peserta didik yang dinyatakan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dikembangkan dari proses pendidikan minimal pada jenjang Pendidikan Dasar 9 tahun sebagai kualitas dasar manusia Indonesia dan lanjutan pada Pendidikan Menengah 3 tahun.

- 4) Kualitas hasil belajar dalam pengetahuan yang dinyatakan dalam Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang selalu dapat diperbaiki dan ditingkatkan setiap saat baik pada waktu oleh peserta didik, baik pada kelas yang sama mau pun di kelas sesudahnya.
- 5) Kualitas hasil belajar yang terkait dengan kemampuan, nilai dan kebiasaan hanya dapat dikembangkan secara berkelanjutan dari kelas 1 (SD/MI) sampai minimal sampai tuntas wajib belajar 9 tahun.
- 6) Peserta didik adalah subjek dalam belajar sehingga proses pendidikan harus menempatkan kepentingan belajar peserta didik sebagai yang utama. Oleh karena itu dalam proses belajar, peserta didik dibantu untuk mencapai kualitas yang dipersyaratkan dari posisi tidak/belum tahu, tidak/belum mau, tidak/belum mampu, ke posisi tahu, mau, dan mampu.
- 7) Sesuai dengan prinsip pendidikan, pengukuran hasil belajar dilakukan untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik pada satu titik waktu sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kesulitan yang dihadapi.
- 8) Kurikulum adalah kurikulum sekolah di setiap jenjang pendidikan, bukan kurikulum kelas.
- 9) Pembelajaran adalah proses realisasi dari rencana pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan.

4. Tujuan Pedoman

Pedoman ini bertujuan memberikan:

- a. Pengertian Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan bagi guru, peserta didik, orang tua, masyarakat agar ada persamaan pemahaman mengenai konsep Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan.
- b. Memberikan landasan legal bagi guru untuk bekerja dalam melaksanakan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan.
- c. Menjadikan rujukan dan arahan yang bersifat umum bagi guru untuk melaksanakan proses pendidikan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan.

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman umum sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan meliputi:

- 1) Pendahuluan; berisi latar belakang kebijakan KTB, landasan legal, landasan pedagogik, dan tujuan dari pedoman ini.
- 2) Sistem pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan; berisi pengertian KTB, tujuan KTB, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, Sistem Kredit Semester, dan Pembelajaran Remedial.
- 3) Pelaksanaan sistem pembelajaran KTB; di mulai dari perencanaan pembelajaran, identifikasi kemampuan peserta didik, pelaksanaan kegiatan kelas tuntas berkelanjutan, dan penilaian hasil belajar kelas tuntas berkelanjutan.

- 4) Penerapan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan yang berisikan informasi mengenai sekolah dan waktu pelaksanaan KTB di kabupaten Gowa.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pedoman ini bersifat umum. Oleh karena itu, pedoman tentang kelima butir di atas bersifat umum pula. Pedoman khusus yang lebih teknis untuk pembelajaran, remedial, sistem SKS, penilaian, penyusunan kurikulum dikembangkan dalam pedoman khusus untuk hal tersebut dan diperuntukan bagi guru dan kepala sekolah.

6. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan berpijak pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum dikembangkan sekolah (KTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 dan 23 tahun 2006 tentang Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Satuan pendidikan mengembangkan KTSP sesuai dengan struktur kurikulum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

Standar Isi (SI) memuat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dikuasai peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi lulusan (SKL) berisikan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Berdasarkan SK dan KD guru mengembangkan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Bentuk pencapaian terhadap Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar adalah apa yang disebut dengan Kompetensi Kelas Minimal (KKM). Peserta didik

yang telah mencapai angka KKM atau di atasnya diartikan sebagai mereka yang telah mencapai ketuntasan. Peserta didik yang memiliki angka rata-rata penilaian hasil belajar dari ulangan harian, ulangan bulanan, dan ulangan semester dibawah angka KKM dinyatakan sebagai mereka yang belum mencapai ketuntasan. Dalam rangka membantu peserta didik mencapai KKM, pelaksanaan atau proses pembelajaran perlu diusahakan agar interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan kesempatan yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

KTSP adalah kurikulum berdasarkan kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, proses pendidikan adalah upaya bersama antara guru dan peserta didik dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam KKM. Pencapaian kompetensi yang dinyatakan dalam KKM adalah karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi yang ingin direalisasikan melalui Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan KTB adalah strategi yang dinilai memiliki tingkat keberhasilan realisasi ide yang diinginkan kurikulum. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan khususnya Kompetensi Kelas Minimal menjadi patokan untuk menyatakan bahwa kurikulum telah dilaksanakan pada jenjang kesuksesan implementasi yang tinggi dan peserta didik telah memiliki kualitas yang diinginkan kurikulum.

7. Sistem Kredit Semester

Pelaksanaan Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mengenal Sistem Kredit Semester (SKS) dan satuan kredit semester (sks). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Penyelesaian pembelajaran atau ketuntasan belajar dalam satu semester diukur dari jumlah kredit yang berhasil dikumpulkan peserta didik berdasarkan beban belajar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006.

Kurikulum yang menggunakan SKS memiliki mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib semuanya harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Mata pelajaran pilihan diikuti oleh peserta didik yang memilih mata pelajaran tersebut yaitu mata pelajaran dari Muatan Lokal dan Pengembangan Kepribadian, masing-masing peserta didik memilih satu mata pelajaran dari sejumlah mata pelajaran yang ada.

Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi jam pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Satuan kredit semester tatap muka adalah 45 menit untuk SMP/MTs dan 45 menit untuk SMA/MA, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan tidak terstruktur.

Jumlah beban belajar dari keseluruhan mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan tidak boleh melebihi 32 sks untuk SMP/MTs, 38/39 sks untuk SMA/MA tatap muka.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Kegiatan tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran mandiri berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Dalam Sistem Kredit Semester dikenal ada kelompok mata pelajaran wajib dan kelompok mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran wajib harus diikuti oleh setiap peserta didik. Kelompok mata pelajaran dipilih peserta didik sesuai dengan minat dan perhatiannya. Penyelesaian pendidikan dari satu satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK) dihitung dari jumlah kredit dari mata pelajaran wajib dan dari mata pelajaran pilihan.

Prinsip yang harus dicermati di dalam menerapkan sistem SKS di dalam SPKTB adalah (1) peserta didik menentukan sendiri beban belajar di atas beban minimal (2) peserta didik menentukan mata pelajaran pilihan yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu

penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.

C. Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan

1. Identifikasi Kemampuan Peserta Didik

Pelaksanaan KTB pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan pendidikan bagi semua peserta didik yang memiliki kemampuan, kecepatan, maupun kualitas belajar berbeda-beda. Agar pelaksanaan KTB tepat sasaran, maka perlu ditempuh langkah-langkah sistematis dalam persiapan pembelajaran yaitu pertama mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan peserta didik, menggunakan informasi awal tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam silabus dan RPP, menggunakan informasi awal dalam proses pembelajaran.

Identifikasi kelebihan dan kekurangan peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik, sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat bagi peserta didik. Perlakuan yang tepat, diharapkan akan terjadi:

1. Minat peserta didik terhadap mata pelajaran,
2. Kecepatan dalam belajar,
3. Rasa ingin tahu,
4. Kemampuan berpikir
5. Kemampuan kerjasama

2. Perencanaan Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan

Hasil analisis mengenai peserta didik yang telah dikemukakan di atas menjadi bahan masukan bagi guru dan sekolah dalam mengembangkan silabus dan RPP. Selain analisis kemampuan peserta didik, untuk mengembangkan silabus dan RPP yang sesuai untuk Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan, guru dan sekolah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pada setiap awal tahun ajaran, guru dan kepala sekolah duduk bersama membahas perencanaan silabus dan RPP. Guru SD/MI kelas 1–6 dan guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK duduk bersama membicarakan pengembangan silabus dan RPP. Perencanaan bersama ini penting untuk menjamin keberlanjutan belajar peserta didik.
- b. Mengembangkan silabus berdasarkan hasil kegiatan berikut:
 - Memilah komponen SK/KD atas komponen pengetahuan, kemampuan berpikir (kognitif), nilai dan sikap (afektif), ketrampilan psikomotorik. Pengetahuan menjadi konten pokok bahasan seperti hukum Boyle, Listrik, Proklamasi, Produksi, Kalimat, dan sebagainya. Kemampuan seperti memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menghasilkan. Nilai seperti jujur, kerja keras, toleransi, cinta tanah air, disiplin dan sebagainya. Materi pokok bahasan dipelajari untuk mengembangkan kemampuan dan nilai.
 - Mengembangkan indikator yang menunjukkan penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, nilai dan sikap, serta ketrampilan psikomotorik.

- Menerapkan prinsip belajar bahwa pengetahuan bersifat dapat dikuasai dalam satu pertemuan kelas. Kemampuan perlu dikembangkan selama 6 atau 3 tahun tergantung pada lamanya belajar formal untuk satu satuan pendidikan.
- Menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari untuk mempelajari pengetahuan pada pokok bahasan berikutnya.
- Mengembangkan kemampuan dan nilai pada setiap pokok bahasan yang dipelajari.
- Menerapkan prinsip 2 – 5 dalam silabus untuk setiap Kompetensi Dasar menjadi RPP.

3. Mengembangkan Kegiatan Kelas Tuntas Berkelanjutan

Kegiatan belajar untuk Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan adalah proses belajar aktif. Proses belajar aktif dilakukan berdasarkan RPP yang sudah dikembangkan guru.

- 1) Belajar aktif menghendaki persyaratan bahwa kegiatan yang akan dilakukan telah dimiliki peserta didik. Dalam kegiatan kelas peserta didik menggunakan kemampuan untuk melakukan 4 kegiatan utama yaitu:
 - a. Mencari dan mengumpulkan informasi (dapat dimulai dari kegiatan membaca, mengamati, atau wawancara) berdasarkan kemampuan yang sudah dipelajari.
 - b. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara yang sudah dipelajari.
 - c. Mengambil kesimpulan dari hasil pengolahan informasi.

d. Mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau pun lisan.

2) Belajar aktif dilaksanakan sebagai berikut:

a. Dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode yang telah dikuasai guru.

b. Peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, masyarakat, lingkungan fisik/alam, dokumen, koran, dan website.

c. Sumber belajar dijadikan bahan kajian dalam bentuk didiskusikan bukan untuk dijadikan bahan untuk dicatat.

d. Dilakukan dalam bentuk pembelajaran kelas, pembelajaran kelompok, dan tugas-tugas perorangan.

e. Dilaksanakan dalam suasana belajar yang menantang peserta didik untuk belajar

3) Prinsip Pembelajaran Tuntas

Dalam Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan digunakan prinsip sebagai berikut:

a. Setiap pengetahuan, kemampuan berpikir, nilai dan sikap, dan ketrampilan psikomotorik dikembangkan dalam suatu keberlanjutan.

b. Setiap peserta didik harus memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir, nilai dan sikap, serta ketrampilan psikomotorik yang telah dirumuskan dalam indikator. Indikator dikembangkan dalam soal yang harus dijawab dan dilakukan peserta didik.

- c. Pokok bahasan berikut dipelajari peserta didik jika yang bersangkutan dinyatakan telah memiliki nilai ulangan harian yang sama atau lebih tinggi dari nilai KKM.
- d. Peserta didik yang belum memiliki nilai sama atau lebih tinggi dari KKM untuk mata pelajaran terkait diberi kesempatan untuk memperbaikinya dalam bentuk pengajaran remedial.

4. Penilaian Hasil Belajar Kelas Tuntas Berkelanjutan

Penilaian hasil belajar sangat penting dalam Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan. Penilaian tersebut menentukan apakah seseorang sudah tuntas menguasai kompetensi yang dipersyaratkan yaitu yang dirumuskan dalam indikator dan tingkat pencapaiannya dinyatakan dalam KKM.

Penilaian hasil belajar berfungsi sebagai berikut:

- a. Membantu guru untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga guru dapat membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang diharuskan.
- b. Membantu peserta didik untuk belajar kompetensi yang belum dikuasainya dengan atau tanpa bantuan guru.

Penilaian hasil belajar diberikan setiap saat dan secara teratur melalui ulangan harian, ulangan bulanan, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Setelah suatu kegiatan penilaian diberikan guru segera mengolah hasilnya dan mendapatkan informasi mengenai prestasi belajar setiap peserta

didik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut ditentukan siapa yang harus mendapatkan remedial dan apa bentuk remedial yang harus diberikan.

Dalam Sistem Pembelajaran Kelas Tuntas Berkelanjutan, siswa yang dapat menyelesaikan tagihan SK secara menyeluruh pada semester/tahun tertentu sebelum waktunya, maka siswa yang bersangkutan diarahkan untuk mengambil SK yang terdapat pada semester/tahun berikutnya. Namun, jika ada siswa yang belum dapat menyelesaikan semua SK/KD yang ditagihkan pada semester/tahun yang berjalan, maka siswa tersebut tidak perlu tinggal kelas, dia tetap melanjutkan pada tahun berikutnya dengan penegasan bahwa siswa tersebut tetap wajib menyelesaikan SK/KD yang belum dituntaskannya.

D. Kerangka Pikir

Salah satu peran dari pemerintah ialah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Disadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

Langkah pemerintah untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera adalah diantaranya dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan selalu dipahami sebagai suatu upaya atau langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam rangka memperbaiki kondisi kehidupan untuk menjadi lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Program pemerintah terlebih khusus pemerintah di Kabupaten Gowa sangat berpengaruh pada pembangunan kota/kabupaten. Suatu program

beguna untuk mempengaruhi atau memicu minat peserta didik untuk ikut ambil bagian dalam program tersebut, sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan harapan bersama demi terciptanya peserta didik yang cerdas, terampil dan profesional.

Pemerintah harus punya suatu program yang aktual yang mampu memberikan pengaruh terhadap proses belajar peserta didik, sehingga bisa mempengaruhi minat peserta didik terhadap program atau keterpanggilan jiwa peserta didik dalam berpartisipasi itu muncul. Pemerintah Kabupaten Gowa sudah sepantasnya menyiapkan konsep atau program yang mampu mempengaruhi peserta didik agar ikut ambil bagian dalam proses pengembangan pendidikan yang ada.

Di samping itu juga perlu kepedulian aktif atau keterlibatan langsung dari aparat pemerintah kabupaten khususnya Dinas pendidikan dalam memberikan seruan-seruan kepada para guru dan peserta didik atau setidaknya dapat mengingatkan kepada mereka bahwa program pendidikan itu adalah untuk kepentingan para peserta didik itu sendiri secara individual juga sehingga mereka merasa terpanggil atau tergugah dan pada akhirnya mereka akan berpartisipasi secara aktif terhadap setiap program pendidikan yang akan dilaksanakan, perlu disampaikan juga bahwa peserta didik tidak akan merasa memiliki atau menikmati hasil program pendidikan apabila dalam proses pelaksanaan program pendidikan tidak mengikutsertakan mereka dalam setiap proses kegiatan pendidikan. Selain itu pemerintah juga memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal pada anak didik dalam suasana pendidikan yang kondusif, sehingga peserta didik dapat

belajar secara optimal dalam suasana belajar yang menyenangkan dan dapat menuntaskan pencapaian kompetensi pada seluruh mata pelajaran disetiap kurikulum satuan pendidikan.

Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah proses pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kualitas kemampuan yang dipersyaratkan kurikulum. SKTB adalah sebuah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang menekankan pada pelayanan pendidikan berkualitas dan komprehensif kepada peserta didik yang memposisikan peserta didik sebagai subjek dalam belajar sehingga mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Kabupaten Gowa memiliki prospek yang sangat besar dalam pengembangan Program Sistem Kelas Berkelanjutan (SKTB) karena didukung oleh peserta didik yang banyak dan aktif serta antusias dalam program yang sedang berjalan serta bekerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, khususnya semua peserta didik mampu menguasai semua kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Melalui Sosialisasi Program

Program Sistem Kelas Berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2012 dengan titik fokus pada seluruh anak bangsa/peserta didik yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Penunjukan Pengelola dan Tim Pengembang SKTB

Salah satu bentuk penataan SKT di Kabupaten Gowa adalah penunjukan pengelola dan Tim Pengembang SKTB yang sesuai dan dianggap mampu menghasilkan program sesuai yang diharapkan. Penunjukan Pengelola

dan Tim Pengembang SKTB tentunya tidak lepas dari berbagai kriteria dari masing-masing individu yang dipilih sebagai salah satu diantara Tim Pelaksana SKTB.

3. Melakukan Evaluasi Secara Bertahap

Kegiatan Evaluasi secara bertahap perlu dilakukan guna menata jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan serta indikator pelaksanaan SKTB yang telah dirancang mampu diterapkan di lapangan, khususnya bagi tenaga pendidik/guru dan peserta didik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dimulai pada bulan Desember 2016 sampai dengan Februari 2017. Lokasi penelitian ini terletak di di Diknas Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah berupaya untuk memahami “Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa“. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sebagai sumber data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (alamiah).

Penelitian tentang Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendeskripsikan tentang Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengukuran dengan tehnik statistik, seperti penelitian kuantitatif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif dan terperinci tentang gejala dan fenomena sosial yang diteliti yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen peningkatan kompetensi profesionalisme pendidik yang diperoleh secara kualitatif. Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan

deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

C. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian (analisis kesimpulan). Data tersebut dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan skunder. Data Primer artinya data yang diperoleh langsung dari sumbernya (informan), sedangkan data skunder artinya data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah orang atau oleh orang lain. Yang dimaksud dengan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, dokumen perorangan yang berhubungan dengan Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa seperti dokumen resmi tentang.

Sumber data dalam penelitian ini menitik beratkan pada manusia, yaitu Pegawai Diknas dan Guru.

Meskipun jumlah subyek penelitian tidak ditentukan, namun proses bergulirnya data penelitian ini berkisar pada subyek yang berada di ruang lingkup Diknas yang secara rinci meliputi : Pegawai Diknas dan Guru di Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini terdiri dari 9 informan yang dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan yang diteliti. Selain itu, informan tersebut adalah pemerintah Kabupaten Gowa, pegawai diknas dan guru di Kabupaten Gowa.

No	Jabatan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	DR. Salam, M.Pd	DS	Kepala Dinas Pendidikan	1
2	Noer Wahidah, S.Sos	NW	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1
3	Hj. Haslinda, SE.M.Si	HH	Kepala Sub Bagian Umum	1
4	DR.Syarifuddin Kulle,M.Pd	SK	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	1
5	Hj. Masnia, SE.MM	HM	Kepala Bidang Paud & Pendidikan Non Formal	1
6	Muh. Taufik, S.Sos	MT	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	1
7	DR. Djohar, M.Si	DD	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1
8	Drs. Mulyadi, M.Si	DM	Kepala Seksi Pendataan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama	1
9	H. Gassing Dg. Tola, S.Pd	HG	Guru (Tenaga Pendidik)	1
Jumlah				9

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Observasi.

Observasi partisipan digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistic atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi

Sejalan dengan teori di atas, proses observasi di Diknas Kabupaten Gowa bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode wawancara atau metode interview dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapataka keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode tak berstruktur, agar peneliti dapat lebih leluasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa.

Dalam wawancara ini, peneliti memilih informan-informan yang di anggap mengetahui persoalan yang diteliti, dalam hal ini adalah Kepala Diknas dan Guru. Peneliti menanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang telah lakukan oleh pemerintah dan sekelompok guru seperti proses belajar, metode belajar dan kurikulum.

3. Metode Dokumentasi

Selain menggunakan metode observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

Data dalam bentuk dokumentasi tersebut utamanya berkenaan dengan Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di Kabupaten Gowa dan selanjutnya dianalisis.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu (Lexy J. Moleong ,2001:103)

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapabanyak, sejauh mana, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1989: 30).

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-sifat analisa datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat developmental.

Dalam hal ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu. Dengan berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisa data-data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

G. Pengabsahan Data

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (Construct validity)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini

juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

a) Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b) Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c) Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d) Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

2. Keabsahan Internal (Internal validity)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (Eksternal validity)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

4. Keajegan (Reabilitas)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitive sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.

Sebagai kabupaten daerah otonom, sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan

wilayah administrasinya Kabupaten Gowa terbagi atas 18 wilayah Kecamatan, 123 Desa dan 44 Kelurahan dengan luas 1.883, 88 Km² atau 3,01% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa merupakan dataran tinggi yakni sekitar 80,17% dan 19,83% merupakan dataran rendah.

2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Sumber Daya Manusia/Aparatur merupakan unsur penting penggerak dan organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategi organisasi, dilihat dari jumlah dan kualifikasinya, maka sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang cukup memadai secara kuantitas dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa per Maret 2017 sebanyak 96 orang dengan kualifikasi Pasca Sarjana (S2) 14 orang, berkualifikasi Sarjana (S1) 31 orang, berkualifikasi Sarjana Muda (D3) 12 orang dan berkualifikasi SLTA atau sederajat 39 orang, serta 5 orang berstatus tenaga honorer.

Sumber Daya Fisik adalah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa antara lain 1 (satu) Gedung Kantor, 1 (satu) Kendaraan roda empat.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

4. Kondisi Sarana

Dalam kaitan pelaksanaan pengembangan potensi objek yang dimiliki, tidaklah terlepas dari perlunya dukungan sarana dan prasarana memadai, hal ini menghendaki adanya keterlibatan stakeholder (pihak terkait) baik pihak swasta maupun pemerintah serta masyarakat di dalam rangka mangakomodir kebutuhan sesuai peruntukan kondisi objek secara terintegrasi dalam sebuah perencanaan yang bermuara pada perwujudan kepentingan timbal balik dengan kata lain bahwa masing-masing pihak dibutuhkan sesuai peranan dan tanggung jawabnya.

5. Data Sekolah Tingkat SD,SMP,SMA/SMK dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

Dinas Pendidikan menaungi beberapa sekolah-sekolah dasar, menengah/kejuruan yang ada dititik koordinat wilayah Kabupaten Gowa.

Tabel 1 Data Sekolah Tingkat SD,SMP,SMA/SMK di Kabupaten Gowa Tahun 2017

No	Tingkat Jenjang Pendidikan	Jumlah	Status
1	SD	412	Aktif
2	SMP	106	Aktif
3	SMA	41	Aktif
4	SMK	14	Aktif

Tabel 1 menunjukkan jumlah sekolah tingkat SD,SMP,SMA/SMK yang ada di Kabupaten Gowa penduduk dimana tingkat SD sebanyak 412 unit sekolah, SMP 106 unit sekolah, SMA sebanyak 41 unit sekolah dan SMK 14 unit sekolah.

6. Jumlah Peserta Didik di Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan daerah yang memiliki banyak peserta didik baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar di sejumlah sekolah-sekolah dasar, menengah pertama dan menengah lanjutan/kejuruan. Untuk mengetahui penyebaran peserta menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2 yaitu:

Tabel 2 Jumlah Peserta Didik menurut jenis kelamin di Kabupaten Gowa Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	SMK
Laki-laki	6.321	6.789	4.224	5.115
Perempuan	8.239	7.587	4.765	2.908
Jumlah	14.560	14.376	8.989	8.023

Tabel 2 menunjukkan jumlah peserta didik di Kabupaten Gowa dimana memiliki jumlah peserta didik tingkat SD sebanyak 14.560 yang terdiri atas 6.321 laki-laki dan 8.239 perempuan, Tingkat SMP sebanyak 14.376 yang terdiri atas 6.789 laki-laki dan 7.587 perempuan. Tingkat SMA sebanyak 8.989 yang terdiri atas 4.224 laki-laki dan 4.765 perempuan. Sedangkan tingkat SMK sebanyak 8.023 yang terdiri atas 2.908 laki-laki dan 5.115 perempuan.

B. Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB)

Kabupaten Gowa

1) Melalui Sosialisasi Program

Program Sistem Kelas Berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2012 dengan titik fokus pada seluruh anak bangsa/peserta didik yang ada di Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan yaitu Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (Automatic Promotion), yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 Tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) adalah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang menekankan pada pelayanan pendidikan secara komprehensif dan tuntas anak didik, menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam belajar, memberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal, khusus anak didik di kabupaten Gowa.

Kebijakan tersebut ditempuh karena pemerintah daerah Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menyadari bahwa sistem pendidikan, terutama pendidikan dasar adalah pondasi dari semua jenjang pendidikan yang ada, yang tersebar dari kota hingga pelosok desa terpencil seharusnya memiliki kekuatan dalam mengembangkan berbagai aspek kemampuan diri peserta didik untuk hidup sebagai anggota masyarakat yang produktif. Juga disadari bahwa pendidikan dasar merupakan kekuatan yang dapat

mengantarkan peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya dan mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Untuk mengetahui apakah kebijakan ini berjalan efektif atau tidak maka penulis mewawancarai semua stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan SKTB di lapangan.

Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa baik dalam satuan perangkat kerja daerah maupun di luar Kabupaten Gowa melalui beberapa seminar pendidikan maupun presentasi di beberapa tempat dengan menghadirkan beberapa perguruan tinggi maupun pemerintah Kabupaten lainnya, selain hal tersebut pemerintah Kabupaten Gowa juga menanggung semua kebutuhan pendanaan terkait SKTB. Bahkan dalam rangka mempersiapkan tenaga pendidik Pemerintah Kabupaten Gowa juga mengadakan workshop yang dilakukan secara terus-menerus namun masih terdapat banyak tenaga pendidik yang belum memahami SKTB. Workshop telah diberikan kepada sekolah beserta tenaga pendidik dalam rangka mempersiapkan tenaga pendidik dalam menghadapi masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan di sekolah. Beberapa guru kurang paham dan sering terhambat dalam penyusunan rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP), sehingga kemampuan dalam mengembangkan media dan bahan ajar menjadi lemah, selain itu beberapa guru memiliki sifat malas dan kurangnya motivasi terkadang menyebabkan kurang maksimalnya persiapan dalam proses belajar (Melanie; 2015). Seperti yang dikatakan

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang mengungkapkan bahwa :

“Sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa baik dalam satuan perangkat kerja daerah maupun di luar Kabupaten Gowa melalui beberapa seminar pendidikan maupun presentasi di beberapa tempat dengan menghadirkan beberapa perguruan tinggi maupun pemerintah Kabupaten lainnya dalam rangka mengembangkan pelaksanaan SKTB”(hasil wawancara dengan DS, 2 Februari 2017).

Kemudian Pengelola dan Penanggung jawab SKTB menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran pemerintah Kabupaten Gowa telah mengatur sedemikian rupa mulai dari penyelenggaraannya sampai langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dengan melalui remedial secara terus menerus sehingga diakhir tahun tidak terdapat lagi siswa yang tidak tuntas maka secara otomatis tidak ada lagi siswa yang tinggal kelas. Selanjutnya faktor yang memengaruhi pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa dapat dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*; faktor yang mendukung pelaksanaan SKTB berupa adanya komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan SKTB ini yang dibuktikan dengan adanya fakta integritas, MoU beserta nota kesepahaman. Ditambah lagi koordinasi antar penyelenggara serta kontrol politik dan organisasi yang berjalan baik, selain itu masyarakat juga merespon dengan baik terhadap pelaksanaan program ini. *Kedua*; faktor yang menghambat pelaksanaan SKTB di lapangan adalah etos kerja dari setiap pelaksana berbeda-beda bahkan

sangat beragam sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat tenaga pendidik yang belum bekerja secara maksimal ditambah lagi adanya masyarakat yang tidak pro dengan pelaksanaan program ini. Selain itu faktor yang menghambat dalam SKTB berkaitan dengan pelaksanaan teknisnya dilapangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru merupakan tulang punggung dalam keberhasilan sistem ini. Maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam melakukan peningkatan sosialisasi baik kepada guru maupun masyarakat. Silfitriana (2016).

Seperti yang dikatakan oleh DR. Syarifuddin Kulle, M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik yang mengungkapkan bahwa :

“Pengelolaan sistem SKTB di Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik sejak tahun 2012 karena dijalankan sesuai indikator, yakni melalui sosialisai, tim pengelola dan pengembang SKTB serta dilakukannya evaluasi secara bertahap”(hasil wawancara dengan SK, 13 Februari 2017).

Setelah satu tahun dalam masa sosialisasi, akhirnya Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) menjadi program pendidikan di Kab Gowa. Sistem yang tidak mengenal tinggal kelas dan Ujian Nasional hanya sebagai syarat legalitas mendapatkan ijazah di luncurkan secara resmi oleh Bupati Gowa, H.Ichsan Yasin Limpo pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Lapangan Discovery Syekh Yusuf,

Peluncuran ini sekaligus ditandai dengan penandatanganan MoU kerjasama Pemkab Gowa dengan 10(sepuluh) PTN dan PTS yang siap menampung keluaran siswa Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan. Penandatanganan ini diwakili langsung dengan Rektor PTN/ PTS yaitu: UNM, Unismuh, UMI, Univ Pendidikan Bandung, Univ Negeri Malang, Univ Jember, UIN, Univ 45 Makassar, UIT dan ITENAS Malang.

Selain itu Pemkab Gowa juga turut melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM bagi PNS non guru yang akan beralih profesi menjadi guru. Mereka yang akan ikut dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 11/2 tahun untuk mendapatkan gelar Sarjana (Spd) sekaligus akta IV. Bahkan setelah kuliah selama enam bulan mereka sudah dapat mengajar di sekolah sehingga setelah program kuliah maka mereka bisa langsung mengikuti program sertifikasi guru.

Bersama UNM, Pemkab Gowa juga menandatangani perjanjian kerjasama pencabutan sertifikasi guru bagi tenaga pengajar yang tidak menjalankan tugasnya (membayar tenaga honorer untuk menggantikan tugas mengajar).

Ichsan Yasin Limpo menjelaskan apa yang dilakukan oleh Pemkab Gowa bertujuan menyiapkan generasi emas. Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, alih profesi menjadi guru hingga pencabutan sertifikasi guru merupakan mata rantai menjadikan dunia pendidikan di Gowa menjadi lebih berkualitas. Anak-anak Gowa adalah anak saya. Saya

menitip mereka kepada guru-guru. Ajari mereka sebaik-baiknya, tegas orang nomor satu di Gowa ini.

Seperti yang dikatakan oleh Noer Wahidah, S.Sos selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang mengungkapkan bahwa :

“Program SKTB dijalankan secara terstruktur dan telah mendapat respon positif dari seluruh stakeholder pendidikan khususnya peserta didik karena mempermudah peserta didik mengakses ilmu dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi” ”(hasil wawancara dengan NW, 13 Februari 2017).

2) Penunjukan Pengelola dan Tim Pengembang SKTB

Salah satu bentuk penataan SKTB di Kabupaten Gowa adalah penunjukan pengelola dan Tim Pengembang SKTB yang sesuai dan dianggap mampu menghasilkan program sesuai yang diharapkan. Penunjukan Pengelola dan Tim Pengembang SKTB tentunya tidak lepas dari berbagai kriteria dari masing-masing individu yang dipilih sebagai salah satu diantara Tim Pelaksana SKTB. Hal ini serupa dengan pendapat Kepala Bagian Sub Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang mengungkapkan bahwa :

“Program SKTB dijalankan sesuai struktur dan yang terpenting dikoordinir oleh Tim Pengelola dan Pengembang SKTB yang memiliki skill dan kriteria-kriteria yang dianggap mampu mensukseskan jalannya program SKTB ” ”(hasil wawancara dengan HH, 13 Februari 2017).

Melalui penunjukan pengelolaan dan pengemangan SKTB maka akan memudahkan tercapainya indikator-indikator program SKTB sesuai Kurikulum yang diterapkan dan diharapkan mampu mencapai semua tujuan dilaksanakan SKTB di Kabupaten Gowa.

Kepala Dina Pendidikan Kabupaten Gowa sangat mengutamakan kriteria – kriteria tim pengelola dan pengembang SKTB, seperti yang diungkapkannya :

“Dalam menjalankan sebuah program pendidikan tentunya tidak lepas dari kriteria dan wawasan tim pengelola dan pengembang. Hal ini karena skill yang dimiliki tim pengelola akan mendukung tercapainya tujuan program SKTB .” (hasil wawancara dengan DS, 2 Februari 2017).

Dalam menunjuk tim pengelola dan pengembang SKTB tentunya tidak lepas dari berbagai kriteria dari masing-masing individu yang dipilih sebagai salah satu diantara Tim Pelaksana SKTB.

3) Melakukan Evaluasi Secara Bertahap

Kegiatan Evaluasi secara bertahap perlu dilakukan guna menata jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan serta indikator pelaksanaan SKTB yang telah dirancang mampu diterapkan di lapangan, khususnya bagi tenaga pendidik/guru dan peserta didik. Perlu adanya evaluasi untuk mengetahui lebih dalam pemahaman guru terkait pelaksanaan SKTB. Dan perlunya dilakukan evaluasi pembelajaran secara bertahap yang diberikan kepada

anak didik untuk menimbang sejauh mana wawasan peserta didik. Evaluasi ini dapat berupa kuis, ujian yang dilakukan setelah selesai pembelajaran mata pelajaran tersebut. Dengan diterapkannya evaluasi ini akan semakin menambah giat belajar peserta didik untuk berlomba memperoleh nilai tambahan dari guru mata pelajaran. Salah satu guru/tenaga pendidik mengatakan bahwa :

“Dengan dijalankannya evaluasi secara bertahap setelah selesai pembelajaran atau pemberian materi kepada peserta didik akan mampu menambah wawasan dan menumbuh kembangkan sikap giat serta semangat belajar peserta didik ” (hasil wawancara dengan HG, 20 Maret 2017).

Kegiatan menumbuh kembangkan berfikir peserta didik dengan cara melakukan evaluasi secara bertahap memberikan respon positif oleh sejumlah guru dan peserta didik guna untuk mengukur sejauhmana pola pikir dan sejauh mana peserta didik menguasai materi yang telah diberikan oleh tenaga pendidik.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama berpendapat yang sama bahwa :

“Salah satu bentuk tata kelola program SKTB ialah melalui evaluasi yang dilakukan secara bertahap kepada peserta oleh tenaga pendidik. Kegiatan ini akan menunjang minat dan profesi anak didik, selain itu kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari struktur kerja yang

telah diterapkan dalam program SKTB ini” (hasil wawancara dengan MT dan DD, 20 Maret 2017).

Evaluasi bertahap diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal karena program SKTB merupakan upaya optimalisasi dan pemberdayaan pendidikan di Kabupaten Gowa.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Tata Kelola Program Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa

1. Faktor Pendukung SKTB

a. Adanya Komitmen Dari Seluruh Stakeholder Yang Terkait Dengan Pelaksanaan SKTB

Pelaksanaan Tata Kelola Program SKTB di Kabupaten Gowa dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya komitmen dari seluruh tim pelaksana yang terkait dengan SKTB. Penerapan komitmen yang telah direncanakan sejak awal pelaksanaan SKTB mampu mendorong jalannya dan suksesnya program Pemerintah Kabupaten Gowa.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendataan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, mengatakan bahwa :

“Komitmen yang dibangun dari masing-masing stakeholder dari awal perencanaan mendukung terlaksananya program SKTB di Kabupaten Gowa.” (hasil wawancara dengan DM, 22 Maret 2017).

Salah satu yang mendukung program SKTB ialah dengan adanya komitmen yang diterapkan masing-masing stakeholder.

Komitmen bersama inilah yang mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam program SKTB.

b. Pelaksanaan SKTB Dilapangan Terkoordinir Dengan Baik

Salah satu faktor yang mendukung tata kelola program, SKTB di Kabupaten Gowa adalah pelaksanaan program SKTB dilapangan terkoordinir dengan baik. Pemerintah Kabupaten Gowa serta tim pengelola dan pengembang SKTB berhasil mengkoordinir jalannya program SKTB di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gowa.

Kepala Sub Bagian Perencanaan mengungkapkan bahwa :

“Program SKTB dijalankan secara terstruktur dan maksimal serta sesuai standar penyelenggaraan pendidikan, tentunya hal ini dikarenakan pelaksanaan SKTB dilapangan terkoordinir dengan sangat baik” (hasil wawancara dengan NW, 22 Maret 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dengan terkoordinirnya pelaksanaan SKTB dilapangan program SKTB dapat dijalankan secara terstruktur dan sesuai standar penyelenggaraan pendidikan.

c. Kontrol Politik Yang Jelas Dengan Lahirnya PERDA SKTB

Dengan adanya kontrol politik yang jelas atau diterbitkannya PERDA tentang SKTB sangat mempengaruhi berhasilnya program Pemerintah Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan program ini diperkuat dengan terbitnya PERDA Pemerintah Daerah Kabupaten

Gowa yang mana dibuat dengan sebenarnya dan wajib dilaksanakan sebagaimana tertera di PERDA tersebut, sehingga tim pengelola dan pengembang SKTB serta tenaga pendidik dan peserta didik fokus pada tujuan SKTB yang telah disusun. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

“Adanya PERDA SKTB yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mempengaruhi berhasilnya program tersebut. yang mana dibuat dengan sebenarnya dan wajib dilaksanakan sebagaimana tertera di PERDA tersebut ” (hasil wawancara dengan DS, 2 Februari 2017).

Tujuan diterbitkannya PERDA ini sebagai pendukung pelaksanaan SKTB sesuai standar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gowa.

d. Kontrol Organisasi Yang Baik Dengan Adanya Evaluasi Setiap Akhir Semester

Melakukan evaluasi setiap akhir semester merupakan salah satu kontrol organisasi yang sangat baik mempengaruhi terwujudnya tujuan SKTB untuk mengetahui peningkatan mutu dan pengetahuan peserta didik. Kegiatan ini setidaknya dilakukan sekali diakhir semester guna meningkatkan dan menambah wawasan berfikir anak peserta didik.

Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

“Pengadaan evaluasi setiap akhir semester merupakan suatu bentuk kontrol organisasi yang dilakukan oleh tim pengelola dan pengembang SKTB. Dimana evaluasi ini SKTB dalam penuntasan pembejaraan melaksanakan system remedial ” (hasil wawancara dengan HM, 20 Maret 2017).

Pengadaan evaluasi setiap akhir semester serta pelaksanaan sistem remedial sangat bermanfaat bagi peserta didik yang memiliki nilai rendah. Peserta didik memiliki kesempatan memperbaiki nilai hasil evaluasi semester akhir. Salah satu guru/tenaga pendidik mengatakan bahwa :

“Dengan dijalankannya evaluasi setiap akhir semester kepada peserta didik kita akan dapat mengukur tingkat wawasan dan ilmu dari peserta didik ” (hasil wawancara dengan HG, 20 Maret 2017).

Kegiatan kontrol organisasi ini sangat mampu mendorong tercapainya pelaksanaan SKTB di Kabupaten Gowa sesuai standar penyelenggaraan pendidikan yang ada.

e. Respon Yang Baik Dari Berbagai Pihak Terutama Sebagian Besar Sekolah dan Masyarakat

Faktor pendukung tata kelola program SKTB lainnya adalah adanya respon yang baik dari berbagai pihak terutama sebagian besar sekolah dan masyarakat. Adanya respon yang positif dari sekolah dan masyarakat sangat mempengaruhi jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan program yang dikeluarkan oleh

pemerintah diterima dengan baik oleh masyarakat terkhusus peserta didik dan tenaga pendidik sehingga pemerintah serta tim pengelolaan dan pengembang program SKTB tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh hasil dari program yang sedang dijelankannya. Seperti yang ungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

“Pelaksanaan program SKTB telah dilaksanakan dengan baik karena adanya respon yang baik dari berbagai pihak terutama sebagian besar sekolah dan masyarakat. Respon yang baik initentunya dipengaruhi oleh struktur dan standar penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan pada program SKTB di Kabupaten Gowa” (hasil wawancara dengan HH, 22 Februari 2017).

Karena program SKTB dijalankan secara struktur dan mendapat respon positif dari sekolah dan masyarakat maka program SKTB dapat terlaksana dengan baik sesuai indikator-indikator yang ada.

2. Faktor Penghambat SKTB

a. Etos Kerja Para Pelaksana Yang Beragam Dengan Latar Belakang Pendidikan Yang Berbeda-beda

Salah satu faktor yang menghambat jalannya program SKTB adalah etos kerja para pelaksana yang beragam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan yang berbeda dikalangan tim pelaksana SKTB mempengaruhi jalannya program dikarenakan pola pikir dan ide-ide serta perbedaan skill dari

masing-masing yang berbeda dan sulit dijadikan satu pemikiran sehingga sulit mendapat kesepakatan akhir. Seperti yang ungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa:

“Perbedaan Latar Pendidikan salah satu yang mempengaruhi etos kerja para pelaksana, pola pikir dan ide-ide serta perbedaan skill dari masing-masing yang berbeda pendidikan sulit dijadikan satu pemikiran sehingga menghambat jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa” (hasil wawancara dengan NW, 22 Februari 2017).

Etos kerja para pelaksana sangat penting dalam menjalankan suatu program khususnya program SKTB. Dalam hal pelaksanaan SKTB perbedaan latar belakang pendidikan menjadi salah satu penghambat kerja para pelaksana SKTB.

b. Masih Terdapat Guru atau Sekolah Yang Belum Memahami Pelaksanaan SKTB

Faktor lainnya adalah masih terdapat guru atau sekolah yang belum memahami pelaksanaan SKTB. Keadaan ini tentunya sangat mempengaruhi jalannya program pemerintah dimana gurusebagai tenaga pendidik yang diharapkan mampu menjalankan serta mengimplementasikan tujuan dari pada program SKTB justru tidak memahami pelaksanaan program tersebut sehingga menghambat serta membutuhkan waktu yang banyak demi tercapainya program SKTB di Kabupaten Gowa.

Kepala Seksi Pendataan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa :

“Sangat disayangkan karena masih banyak tenaga pendidik atau sekolah yang belum memahami tentang program SKTB yang sedang kita jalankan sehingga menghambat jalannya program pemberdayaan pendidikan di Kabupaten Gowa” (hasil wawancara dengan DM, 22 Februari 2017).

Meski program SKTB bukan hal baru di Kabupaten Gowa namun masih banyak guru atau sekolah yang belum mengerti akan program tersebut sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan SKTB.

D. Peran pemerintah dalam tata kelola program sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa

1. Pembuatan Regulasi Pendidikan

Regulasi Pendidikan adalah peraturan pemerintah daerah tentang pendidikan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gowa membuat suatu PERDA tentang SKTB yang sedang dijalankan di Kabupaten Gowa. Dengan adanya PERDA ini sangat membantu tim pengelola dan pengembang dalam melaksanakan struktur dan standar pemberdayaan pendidikan di Kabupaten Gowa. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, mengungkapkan bahwa :

“Salah satu peran utama Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan SKTB ini ialah dengan dibuatnya regulasi pendidikan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) tentang SKTB dengan adanya PERDA ini tim pengelola dan pelaksanaan program bekerja secara terstruktur dan mengikuti standar penyelenggaraan pendidikan” (hasil wawancara dengan SK, 13 Maret 2017).

Regulasi pendidikan merupakan salah satu bentuk aspirasi pemerintah daerah guna mendukung jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa.

2. Pengawasan

Tindakan pengawasan merupakan bentuk peran pemerintah daerah dalam mendukung jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa. Pengawasan ini biasanya dilakukan sekali atau dua kali setiap semester. Tindakan ini membantu tim pengelola dan pengembang SKTB memantau sejauhmana perkembangan jalannya program pendidikan di Kabupaten Gowa. Hal ini seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, mengungkapkan bahwa :

“Tindakan pemerintah dalam pengawasan yang dilakukan sekali atau dua kali setiap semester sangat membantu kami dalam proses memantau dan memperoleh hasil dari pelaksanaan SKTB ” (hasil wawancara dengan DD, 13 Maret 2017).

Pelaksanaan SKTB tidak lepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten Gowa guna memantau jalannya program sesuai standar pendidikan agar pelaksanaannya dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat lima Tata Kelola Program Sistem Kelas Berkelanjutan (SKTB) yang diambil Pemerintah Kabupaten Gowa.

Pertama, Melalui Sosialisasi Program. Program Sistem Kelas Berkelanjutan telah dilaksanakan dengan baik sejak tahun 2012 dengan titik fokus pada seluruh anak bangsa/peserta didik yang ada di Kabupaten Gowa.

Kedua, Penunjukan Pengelola dan Tim Pengembang SKTB. Salah satu bentuk penataan SKT di Kabupaten Gowa adalah penunjukan pengelola dan Tim Pengembang SKTB yang sesuai dan dianggap mampu menghasilkan program sesuai yang diharapkan. Penunjukan Pengelola dan Tim Pengembang SKTB tentunya tidak lepas dari berbagai kriteria dari masing-masing individu yang dipilih sebagai salah satu diantara Tim Pelaksana dan pengembang SKTB.

Ketiga, Melakukan Evaluasi Secara Bertahap. Kegiatan Evaluasi secara bertahap perlu dilakukan guna menata jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan serta indikator pelaksanaan SKTB yang telah dirancang mampu diterapkan di lapangan, khususnya bagi tenaga pendidik/guru dan peserta didik.

Jalannya program SKTB di Kabupaten Gowa dilandasi oleh beberapa aspek pendukung SKTB yang merupakan serangkaian proses, cara atau

kegiatan yang dilakukan yang mendukung jalannya program kelas sistem tuntas berkelanjutan. Serta peran Pemerintah Gowa terkait kegiatan – kegiatan atau tindakan yang dilakukan pemerintah demi terlaksananya program SKTB.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan Tata Kelola Program Sistem Kelas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan dan dorongan kuat pemerintah dan peserta didik untuk mewujudkan program SKTB tersebut.
2. Perlunya dukungan pemerintah dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan peserta didik dalam program SKTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur. 2012. Desain Pembelajaran. Penerbit Ombak : Yogyakarta.
- Abdul Gafur. 2001. Desain Instruksional (Suatu Langkah Sistematis Penyusunan Pola Kegiatan Belajar dan Mengajar). Solo: Tiga Serangkai.
- Al-Samarrai, S. (2013). Local Governance and Education Performance: a Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. Human Development. Jakarta: World Bank.
- Ali, Mohammad, 2009, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi. Jakarta: Intima.
- Arikunto. 1990. Prosedur penelitian suatu tinjauan prektek. Jakarta : Rineka Cipta
- Aritonang, Keke. 2008. Minat dan Motivasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Yogyakarta
- Arsyad, Azhar. 1997. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azwar, S. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darmadi, Hamid , 2003, Dasar Konsep Pendidikan Moral. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Sekjen Debdikbud.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.2012.*Program SKTB*.Gowa.
- Direktorat Pendidikan Menengah Umum (2001). Kebijakan Pendidikan Menengah Umum. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hidayat, Ayatollah.,dan Ulfa Tenri Batari.2014. Sistem Kelas Berkelanjutan. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.
- http://www.kompasiana.com/aidilazmy/administrasipendidikan_5512754fa333116259ba7da2

PA 2110-1: Governance: Definition (April, 2010)

Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Sekolah Unggulan.2007.*Ilmu Pendidikan*.Bandung: Slamet Imam Santoso.

Silfitriana, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB) di Kabupaten Gowa. Universitas Hasanuddin.

Syamsuddin, M. M. (2015). Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pelaksanaan Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan di SD INPRES Cambaya). Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

UU Nomor 20.2003.Sistim Pendidikan Nasional.

UU Nomor 32.2004 .Pemerintah Daerah tentang urusan pendidikan yang dilimpahkan menjadi wewenang pemerintah daerah kota/kabupaten dan propinsi.